

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Labuhan Deli berada di pesisir Sumatera Timur dimana letaknya menghadap ke Selat Malaka dan dialiri oleh sungai Deli yang membelah Kota Medan. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai pintu gerbang sebelum memasuki kawasan Medan jika menggunakan transportasi air. Keadaan selat Malaka yang ramai membuat tidak sedikit kapal dari para pedagang yang mencoba peruntungan memasuki kawasan ini. Di dukung dengan keadaan sungai Deli yang mempermudah untuk memasuki kawasan ini dengan arus yang tenang, terbukti sampai saat ini masih banyak kapal berukuran kecil masuk ke kawasan Kota Labuhan Deli.

Keadaan alam yang mendukung di kawasan Kota Labuhan Deli, seakan memberikan daya tarik bagi Kesultanan Deli untuk memanfaatkannya sebagai kawasan penting dalam menjalankan pemerintahan. Kesultanan Deli yang mashyur akan produk minyak wangi, sandalwood, kapur barus dan nard (Sinar 2006:51). Hal tersebut membuat kegiatan perdagangan harus dengan efisien dikarenakan produk tersebut dijual bukan hanya kepada bangsa sekitaran Malaka saja, melainkan juga dengan bangsa Belanda. Maka dari itu Kota Labuhan Deli pun dianggap pantas dijadikan pusat pemerintahan agar mempermudah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Kesultanan Deli.

Kota Labuhan Deli dipilih sebagai pusat pemerintahan setelah sebelumnya berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Diawali oleh Deli Tua yang menjadi cikal bakal Kesultanan Deli yang dikenal juga dengan Kerajaan Aru. Kemudian mengalami perpindahan dimasa kepemimpinan Tuanku Panglima Perunggit, memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Deli ke daerah Padang Datar yang saat ini dikenal dengan Kota Medan. Tidak berhenti di situ, perpindahan pusat pemerintahan pun terjadi ketika Raja Deli ketiga yakni Tuanku Panglima Padrap yang memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Pulau Berayan (Takari,dkk 2012:76). Namun perpindahan pusat pemerintahan ke Kota Labuhan Deli yang dilakukan oleh Tuanku Panglima Pasutan seakan merupakan perpindahan terakhir yang dilakukan, dikarenakan hal tersebut tidak dilakukan oleh pemegang tahta tertinggi di Kesultanan Deli selanjutnya.

Kesultanan Deli mengalami perpindahan pusat pemerintahan selama masa aktifnya. Perpindahan ini dilakukan oleh kesultanan Deli disebabkan berbagai faktor yang mendukung agar jalannya pemerintahan lebih baik. Pantaslah jika dapat dikatakan bahwasanya perpindahan pusat pemerintahan ini dilakukan sebagai strategi politik, untuk lebih mudah memerintah Kesultanan Deli dan kawasan-kawasan taklukannya (Takari,dkk 2012:76). Wajar bila hal tersebut dilakukan jika dilihat daerah taklukan Kesultanan Deli yang cukup luas. Sebagai bentuk menjaga kekuasaan politik dari gangguan kerajaan lain.

Berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam perpindahan pusat pemerintahan sangat penting, karena hal tersebutlah yang mampu membuat tujuan dari Kesultanan Deli dapat tercapai. Pencapaian itu berupa peningkatan

keuntungan dari penjualan berbagai komoditi dan mempermudah dalam memerintah kawasan Kesultanan Deli serta kawasan taklukannya. Jika aspek yang menjadi pendukung utama terbentuknya pusat pemerintahan tidak dapat terpenuhi di suatu tempat, maka harus lah segera mencari suatu tempat yang lebih tepat. Hal ini lah yang terjadi oleh Kesultanan Deli yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan, sebagai sentral kegiatan politik dan ekonomi sebagai penopang kegiatan masyarakat.

Setelah didapatkan suatu kawasan yang tepat dalam membangun pusat pemerintahan, maka perpindahan pun dilakukan oleh Kesultanan Deli. Labuhan dipilih sebagai kawasan yang memenuhi aspek kebutuhan Kesultanan Deli sebagai pusat pemerintahan. Pembangunan baik itu secara fisik maupun non fisik dilakukan sedemikian rupa sebagai proses terbentuknya pusat pemerintahan yang kelak sebagai sarana pendukung segala tujuan dari Kesultanan Deli. Keadaan fisik yang berupa bangunan sudah nampak jelas sebagai penopang berbagai kegiatan pemerintahan maupun masyarakat dan pembangunan secara non fisik yang meliputi beberapa peraturan dalam kehidupan masyarakat di Kota Labuhan Deli, baik itu dari kalangan Istana maupun dari kalangan masyarakat kebanyakan atau rakyat biasa.

Pembangunan yang dilakukan seharusnya mampu memiliki keselarasan antara fisik maupun non fisik. Keselarasan ini akan memperlihatkan bagaimana jalannya suatu pemerintahan yang kuat, terutama keharmonisan di dalam masyarakat yang diperintah. Hal ini akan terlihat jika kita mampu membayangkan bagaimana terjadi interaksi antar umat beragama dari berbagai etnis yang datang

di kawasan ini hidup berdampingan selama waktu yang tidak sebentar. Pembangunan ini lah merupakan faktor pendukung jalannya suatu pemerintahan karena memberikan segala kebutuhan masyarakatnya.

Terlepas dari berbagai strategi politik yang dilakukan Kesultanan Deli dalam menjalankan pemerintahannya, saat ini Kesultanan Deli sudah menjadi identitas bagi Kota Medan. Kesultanan Deli sangat identik dengan Kota Medan, dimana kawasannya merupakan daerah taklukan Kesultanan Deli. Diawali oleh lambang Kesultanan Deli dan Kota Medan yang menjadikan Tembakau Deli sebagai simbol penting yang harus dimasukkan kedalamnya. Bahkan suatu simbol Pariwisata Kota Medan saat ini adalah Istana Maemon. Jauh sebelum Kesultanan Deli menempatkan suatu pusat pemerintahan di kawasan yang saat ini dikenal dengan Kota Maksu, Kota Labuhan Deli sempat menjadi Pusat pemerintahannya. Kesultanan Deli lebih lama menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dibandingkan dengan Kota Maksu, seakan melupakan kawasan Kota Labuhan Deli.

Keberadaan kawasan Kota Labuhan Deli berperan penting mengantarkan kejayaan Kesultanan Deli sebagai Pusat Pemerintahan pada tahun 1728 sampai dengan tahun 1888 dengan berbagai peninggalannya yang saat ini masih ada, mampu menceritakan apa yang terjadi di masa lampau di kawasan ini. Mengingat begitu pentingnya perpindahan hingga terbentuknya pusat pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kota Labuhan Deli Sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses terbentuknya suatu pusat pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli
2. Faktor yang menyebabkan Kota Labuhan Deli sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli
3. Sarana pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah bahwa kajian tentang Kesultanan Deli memiliki kajian yang cukup luas, oleh karena itu peneliti perlu membuat pembatasan agar lebih terfokus pada: **“Kota Labuhan Deli sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli”**

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terbentuknya pusat pemerintah Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli ?
2. Apakah faktor pendukung Kota Labuhan Deli sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli ?

3. Bagaimana sarana Pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Kota Labuhan Deli sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli
2. Untuk mengetahui proses terbentuknya pusat pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli
3. Untuk mengetahui sarana Pemerintahan Kesultanan Deli di Kota Labuhan Deli

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Kota Labuhan Deli sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli
2. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah
3. Sebagai penambah informasi kepada penelitian yang relevan di masa yang akan datang
4. Untuk menambah khasanah kepustakaan UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah.